

B u l e t i n



PARLEMENTARIA

Benahi Pendidikan Hingga ke Ujung Timur

KORKESRA
Momentum
Pengawasan
Ruang Digital

KORINBANG
Ajak Anak Muda
Kembali ke Sawah
Bawa Teknologi

Nomor 1366/IV/X/2025 Oktober 2025



9 772614 339005



Benahi Pendidikan Hingga ke Ujung Timur



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meninjau langsung kondisi fasilitas pendidikan SMP Negeri 5 Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (06/10) yang dinilai tidak layak. Temuan tersebut menjadi dasar dorongan Komisi X DPR RI agar revitalisasi pendidikan benar-benar dijalankan secara menyeluruh.

Komisi X DPR RI menaruh perhatian serius pada kondisi fasilitas pendidikan di Papua Barat Daya.

Dalam kunjungannya ke Sorong, Komisi X meninjau langsung SD Negeri 3 Sorong dan SMP Negeri 5 Sorong yang dinilai tidak layak. Temuan tersebut menjadi dasar dorongan agar revitalisasi pendidikan benar-benar dijalankan secara menyeluruh.

SD Negeri 3 Sorong dilaporkan tidak memiliki toilet meski menampung hingga 300 siswa, yang dianggap sangat berisiko terhadap kesehatan. Sementara di SMP Negeri 5 Sorong, sekolah kerap digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab pada malam hari untuk kegiatan mabuk-mabukan.

“Hal ini mengakibatkan hilangnya sejumlah aset sekolah dan mengganggu keamanan lingkungan belajar,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani kepada **Parlementaria** saat memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (6/10).

Komisi X menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemerataan pembangunan sekolah. Revitalisasi pendidikan yang ditargetkan rampung pada 2025 disebut belum menyentuh seluruh daerah, termasuk Papua Barat Daya. “Oleh karena itu, Komisi X memberikan bantuan sebesar Rp100 juta untuk masing-masing sekolah guna perbaikan mendesak,” jelasnya.

Politisi Fraksi PKB itu menilai bantuan tersebut dipandang belum cukup. Komisi X menegaskan

pada 2026, nilai bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan sekolah. Komisi X juga meminta pemerintah pusat memastikan dana revitalisasi dapat digunakan lebih fleksibel, sehingga sekolah di Papua Barat Daya bisa segera diperbaiki.

Kendala utama revitalisasi disebut terletak pada aturan PP Nomor 106 /2021 yang membatasi kewenangan pemerintah provinsi dalam pembinaan sekolah SMA/ SMK. Diketahui, PP Nomor 106 Tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah yang berlaku khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Aturan ini menimbulkan protes dari berbagai pihak karena masalah pelaksanaan, seperti keterlambatan gaji guru, dan berdampak pada perubahan struktur organisasi dinas pendidikan setempat.

“Hal ini membuat dana pendidikan provinsi tidak bisa digunakan untuk pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Komisi X berencana mengoordinasikan persoalan ini dengan Kemendagri agar tidak menghambat peningkatan mutu pendidikan,” pungkasnya.

Dengan komitmen ini, Komisi X berharap revitalisasi pendidikan benar-benar dirasakan secara merata oleh semua sekolah di Papua Barat Daya. DPR menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian terkait untuk mempercepat pembenahan sarana pendidikan. **man/rdn**



Momentum Pengawasan Ruang Digital



FOTO: ENO/PDT

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Cucun Ahmad Syamsurijal dalam pertemuan bersama Himpunan Alumni Santri Lirboyo, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Trans 7, di Kompleks Parlemen.

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan komitmen DPR dalam mengawal penegakan etika penyiaran nasional pasca tayangan kontroversial di Trans 7 yang dinilai menyinggung komunitas santri dan pesantren.

Menurut Cucun, tindakan penghentian tayangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral lembaga penyiaran publik terhadap keberagaman sosial dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia. "Kami mengapresiasi langkah KPI yang sudah mengambil tindakan cepat dengan menjatuhkan sanksi penghentian program. Bahkan

tadi ditegaskan, bukan hanya penghentian sementara, tetapi program itu sudah tidak ada lagi," ujarnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Kamis (16/10/2025).

Selain apresiasi terhadap KPI, DPR juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama KPI melakukan audit menyeluruh terhadap izin siar Trans 7. Audit tersebut, kata Cucun, penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan siaran televisi nasional tetap mematuhi norma hukum dan etika penyiaran sebagaimana diatur dalam undang-undang. "Kami mendorong Komdigi dan KPI bersama-sama melakukan evaluasi izin hak siar, sesuai hasil audit dan temuan yang ada," tambahnya. **fa/rdn**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kabag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kabag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kabag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puritno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila.

FOTOGRAFER

Naefurroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldio Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri, Mario Fernandez

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kabag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kabag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: TS/PDT

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat membuka agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Anak Muda Kembali ke Sawah Bawa Teknologi

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan soal masa depan pertanian Indonesia berada di ambang risiko serius jika regenerasi petani tidak segera dilakukan. Ia mengingatkan, semakin sedikitnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian bisa mengancam keberlanjutan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

"Sekarang makin sulit mencari orang yang mau nandur, apalagi anak muda. Mereka lebih tertarik

kerja di pabrik daripada turun ke sawah. Kalau ini dibiarkan, sepuluh tahun lagi kita bisa kekurangan petani," ujar Saan saat membuka agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10).

Terbukti, data nasional menunjukkan urgensi yang disampaikan bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, hanya sekitar 11,5 persen petani Indonesia yang berusia di bawah 34 tahun, sementara mayoritas berada di kelompok usia 43–58 tahun dan 59–77

tahun. Kementerian Pertanian juga mencatat jumlah petani muda berusia 20–39 tahun hanya sekitar 8 persen dari total petani atau setara 2,7 juta orang.

Selain itu, program "Petani Keren" yang berjalan hingga tahun 2025 memperlihatkan masih dominannya petani berusia di atas 40 tahun, meskipun upaya regenerasi telah dilakukan melalui pelatihan dan kolaborasi lintas lembaga.

Menurut Saan, persoalan regenerasi petani tidak bisa dianggap sepele, melainkan menjadi kebutuhan mendesak. Ia menilai, harus ada perubahan paradigma agar anak muda melihat pertanian sebagai sektor modern dan menjanjikan.

"Kita harus ubah cara pandang. Pertanian itu bukan sekadar cangkul dan lumpur, tapi juga soal inovasi, teknologi, dan data. Dengan pendekatan digital farming, anak muda pasti mau kembali ke lahan," tegasnya. [um/aha](#)



Banyuasin Potensi Jadi Lumbung Dunia



Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki potensi besar dalam agenda mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Menurutnya, Banyuasin telah membuktikan diri sebagai penopang utama produksi pangan nasional yang tidak hanya menopang Sumatera Selatan, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan Indonesia.

“Banyuasin adalah tulang punggung pangan nasional. Daerah

ini bukan hanya unggul di tingkat provinsi, tapi sudah menjadi bagian dari arah besar kebijakan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia,” ujar Saan Mustopa di sela-sela agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10).

Terbukti, berdasarkan data Badan Data dan Sistem Informasi Pertanian (BDSP) Kementerian Pertanian tahun 2024, produksi padi Sumatera Selatan mencapai 2,9 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), di mana Banyuasin menyumbang sekitar 948 ribu ton. Luas panen di wilayah ini mencapai 189 ribu hektare atau hampir sepertiga dari

total luas panen padi Sumatera Selatan.

Capaian ini menempatkan Banyuasin sebagai salah satu daerah dengan kontribusi tertinggi dalam produksi padi nasional setelah Karawang, Jawa Barat. Mengetahui fakta ini, dirinya menilai, capaian Banyuasin menjadi bukti bahwa potensi daerah harus terus diperkuat agar target swasembada yang ditetapkan pemerintah tercapai.

Ia pun menegaskan DPR berkomitmen mengawal kebijakan pangan nasional, termasuk memastikan dukungan infrastruktur dan anggaran bagi daerah-daerah produktif seperti Banyuasin. — **um,blf/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Suarakan Kemerdekaan Penuh Palestina

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta berharap kehadiran

Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir membawa hasil positif bagi kemerdekaan Palestina. Ia menilai kehadiran Presiden Prabowo pada gelaran tersebut juga dapat berdampak baik bagi Indonesia.

"Kami mengapresiasi

kesigapan Presiden Prabowo dalam memenuhi undangan dadakan untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Tentu ini akan menjadi sejarah bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam perwujudan perdamaian di Timur Tengah," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (14/10).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza di Mesir, Senin (13/10). Kehadiran Presiden Prabowo merupakan bagian dari komitmen Indonesia yang selama ini sudah aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Diharapkan, pertemuan tersebut bisa membawa perdamaian di Gaza, Palestina.

Kehadiran Presiden Prabowo merupakan bagian dari komitmen Indonesia yang selama ini sudah aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Sukamta pun berharap dalam pertemuan itu Presiden Prabowo dapat menegaskan bahwa perdamaian abadi akan terwujud apabila Palestina merdeka. Ia mengingatkan bahwa Indonesia, ketika masa perjuangan merebut kemerdekaan dulu, memiliki slogan 'Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan'.

Hal inilah, kata Sukamta, yang terus memberi semangat kepada bangsa Indonesia untuk terus berjuang tanpa kenal lelah mewujudkan kemerdekaan, meski harus terus berperang dan melakukan upaya diplomasi di forum-forum internasional.

 **we/aha**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta.



FOTO : IST/PDT



Bentuk Pengawasan ASN Independen

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Rifqi menyebut, putusan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam proses revisi UU ASN yang

Penerapan pengawasan sistem merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN yang dilakukan oleh suatu lembaga independen

Ketua Komisi II DPR RI
Muhammad Rifqinizamy
Karsayuda.



saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI bersama pemerintah.

“Pertama, tentu Komisi II DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan menjadi salah satu masukan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini sudah teragendakan dalam prolegnas prioritas yang disepakati antara DPR dengan pemerintah,” ujar Rifqi di Jakarta, Jumat (17/10).

Sebelumnya, MK menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “penerapan pengawasan sistem merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN yang dilakukan oleh suatu lembaga independen”.

Menanggapi hal tersebut, Rifqi menjelaskan bahwa sejak dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap sistem merit dalam birokrasi dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka kita semua wajib mengikhtikarkan hadirnya satu lembaga baru yang bertugas secara otonom untuk memastikan bagaimana seluruh proses mulai dari pengangkatan, mutasi, rotasi, demosi, promosi, sampai dengan pemberhentian aparatur sipil negara dapat dilakukan dengan baik,” terang Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



PIMPINAN KOMISI II DPR RI

FOTO: MUN/PDT

Kuasa Hukum Dampingi Warga Sejak Jadi Saksi

Komisi III DPR RI melanjutkan penyerapan aspirasi untuk perjalanan revisi terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyelesaian pembahasan menjadi penting karena adanya kebutuhan mendesak akan hadirnya sistem peradilan Indonesia yang lebih adil dan seimbang bagi pencari keadilan. Dalam kesempatan ini, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) dengan aliansi mahasiswa nusantara.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengungkapkan, pembahasan makin mendesak karena KUHP yang masih berjalan saat ini masih menempatkan warga negara

Pembahasan makin mendesak karena KUHP yang masih berjalan saat ini masih menempatkan warga negara dalam posisi yang lemah

dalam posisi yang lemah. “Dia baru bisa didampingi penasihat hukum atau kuasa hukum setelah berstatus tersangka. Itu istilahnya, bisa jadi sudah babak belur dulu, sudah bikin pengakuan macam-macam, baru bisa didampingi kuasa hukum,” ujar Habiburokhman saat memimpin RDPU di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).

Makin parah, sambung Habiburokhman, kewenangan kuasa hukum dalam situasi tersebut pun terbatas. Misalnya saja, kuasa hukum hanya boleh duduk diam, mencatat, mendengarkan, bahkan dibatasi geraknya untuk melakukan pembelaan maupun berkomunikasi aktif dengan kliennya. Kewenangan kuasa hukum yang dibatasi ini semakin menunjukkan belum munculnya sistem peradilan yang adil.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga bilang, KUHP merupakan aturan yang mengatur relasi antara negara dengan warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum. Selama ini, relasi tersebut tidak berjalan seimbang. Negara memiliki kekuasaan yang sangat besar, sedangkan warga negara praktis tidak berdaya.

— ujm/rdn

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat saat memimpin RDPU di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).



Tambah Penyuluh Pertanian, Kawal Swasembada Pangan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto saat agenda peninjauan kerja lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan bahwa kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang terjadi saat ini, menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi pemerintah. Menurutnya, keberadaan penyuluh adalah faktor kunci dalam menjaga produktivitas dan kualitas pertanian nasional, terutama di daerah sentra pangan seperti Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Penyuluh pertanian adalah ujung tombak. Mereka yang mendampingi petani di lapangan, memberikan bimbingan teknis,

mengawasi pola tanam, hingga memastikan penggunaan pupuk dan benih tepat. Kalau penyuluhnya kurang, produktivitas bisa turun,” ujar Panggah usai agenda peninjauan kerja lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10).

Dirinya menjelaskan, banyak penyuluh yang sebelumnya bekerja di lapangan kini beralih profesi setelah adanya penyerapan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menyebabkan kekosongan di sejumlah wilayah yang sebelumnya bergantung pada tenaga penyuluh daerah.

Kondisi ini, teranganya, tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak langsung pada pencapaian target swasembada pangan nasional tahun 2027.

Terbukti, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2024, Indonesia memiliki sekitar 49.900 penyuluh pertanian aktif, baik berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, maupun tenaga harian lepas. Namun jumlah ini masih jauh dari ideal, mengingat kebutuhan nasional mencapai sekitar 75.000 orang untuk mendampingi lebih dari 33 juta petani di seluruh Indonesia. Artinya, terdapat kekurangan sekitar 25.000 penyuluh pertanian di lapangan.

um/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Percepat Infrastruktur Pangan Sumatera Selatan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan komitmen DPR untuk menindaklanjuti berbagai persoalan infrastruktur pendukung pangan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Lebih lanjut, ia menyatakan pihaknya segera akan membahas secara khusus dengan melibatkan seluruh mitra kerja terkait isu di Sumatera Selatan.

“Pak Gubernur (Sumatera Selatan), nanti kami akan mencoba untuk melakukan kunjungan kerja Komisi V secara khusus ke Provinsi Sumatera Selatan dengan menghadirkan seluruh

mitra Komisi V. Karena ada yang menyangkut masalah Kementerian Perhubungan, dan beberapa Dirjen yang saat ini belum hadir. Nanti kita ingin pembahasan lebih lengkap dan menjadi prioritas utama bagi Komisi V,” ujar Iwan dalam agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10).

Di sisi lain, terkait isu kemacetan akibat penyempitan jalur di kawasan Palembang–Betung yang disebut seperti “bottleneck” kemacetan, ia mengingatkan Kementerian PU agar segera mempercepat penyelesaian ruas tersebut, karena jalur tersebut menjadi simpul strategis transportasi pangan di wilayah Sumatera bagian selatan.

Selain itu, Komisi V DPR juga menyoroti progres pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan yang sempat mengalami kendala teknis, termasuk dugaan kesalahan pada titik tapak dan data topografi. Dirinya pun juga meminta Kementerian PU agar masalah teknis segera diselesaikan. Sebab, jelasnya, bendungan tersebut sangat penting bagi pengairan dan produktivitas pertanian daerah.

“Bendungan ini harus kita rampungkan. Kalau memang ada kesalahan titik tapak atau data yang kurang tepat, segera koreksi dan pastikan tidak berlarut. Karena kalau bendungannya jadi tapi irigasinya tertinggal, manfaatnya tidak akan dirasakan oleh petani,” ujarnya.

 [um/rdn](#)



BP BUMN Harus Cari Alternatif Pembiayaan KCIC

Ketua Komisi VI DPR RI menyoroti kondisi keuangan dan kelayakan pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Proyek transportasi modern yang diharapkan menjadi simbol kemajuan infrastruktur nasional ini dinilai perlu mendapat evaluasi menyeluruh, terutama setelah muncul laporan mengenai besarnya utang yang membebani konsorsium.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyampaikan bahwa pihaknya memahami proyek KCIC sejak awal tidak dibiayai langsung oleh pemerintah, melainkan melalui pembentukan konsorsium antara BUMN dan mitra asing. Namun, seiring berjalannya waktu, beban

Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali.

finansial proyek semakin berat sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan BUMN yang terlibat.

“Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi. Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali. Kita belum tahu sampai kapan bisa terbayarkan,” ujar Anggia saat wawancara langsung dengan **Parlementaria**, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/10).

Menurutnya, situasi yang dihadapi konsorsium KCIC saat ini menuntut perhatian serius dari pemerintah. Jika tidak ditangani dengan baik, beban utang dapat menghambat kinerja BUMN dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian/ lembaga dalam mencari solusi. Terutama, sinergi antara BP BUMN dan Kementerian Keuangan dinilai penting untuk memastikan bahwa langkah penyelamatan proyek tidak menimbulkan risiko fiskal baru bagi negara. — **bit/rdn**

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini saat wawancara langsung dengan **Parlementaria**, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/10/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya

FOTO: FHN/PDT

Pemprov Kalsel Harus Segera Tindak Lanjuti Perpres 14/2025

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Hal tersebut disampaikan Sudian Noor saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, di Banjar Baru, Minggu (6/10). Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan momentum penting bagi Kalimantan Selatan untuk

memperkuat ketahanan pangan, energi, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

“Perpres Nomor 14 Tahun 2025 ini adalah momentum emas yang harus kita tangkap. Dari empat kawasan strategis nasional yang ditetapkan pemerintah, salah satunya berada di Provinsi

Kalimantan Selatan, bersama Papua Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah,” ujar Sudian Noor saat membuka rapat.

Politisi Fraksi PAN tersebut menjelaskan, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk mendukung program nasional swasembada pangan, energi, dan air. Namun demikian, ia menilai masih banyak aspek perencanaan yang perlu diperkuat di tingkat daerah agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.

“Beberapa kabupaten sudah mulai mempersiapkan diri, tetapi masih ada yang perlu menyempurnakan rencana pengembangannya. Kita harap, melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, percepatan kawasan swasembada ini bisa segera terealisasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sudian Noor juga memastikan bahwa pihaknya di Komisi VIII DPR RI akan berkoordinasi dengan komisi lain yang membidangi ketahanan pangan, energi, dan pembangunan daerah. Ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Selatan untuk menjalin komunikasi aktif dengan DPR RI guna memperkuat dukungan lintas sektor terhadap implementasi Perpres 14/2025.

 gys/rdn

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, di Banjar Baru, Minggu (6/10/2025).



FOTO: GYS/PDT

Kolaborasi Pusat-Daerah Potensi Perkuat Industri Halal di Kalsel



Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor, dalam pertemuan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur di Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor, mendorong adanya penguatan sektor industri halal di Kalimantan Selatan sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal. Hal ini disampaikan Sudian Noor saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Minggu (6/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sudian Noor menyampaikan

Keberadaan kawasan halal bukan hanya simbol keagamaan, melainkan juga pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah

pentingnya dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk kawasan institusi halal di Kalimantan Selatan, khususnya

di wilayah Kalimantan Kelantan. Menurutnya, potensi ekonomi halal di daerah ini sangat besar, namun belum seluruhnya tergarap secara optimal.

"Kita ingin menampakkan arah yang jelas terhadap pengembangan industri halal. Karena sesungguhnya banyak kegiatan dan produk di Kalimantan Kelantan ini sudah halal, hanya belum tampak, belum dikatakan. Halal tapi tersembunyi," ujar Politisi Fraksi PAN ini.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan kawasan halal bukan hanya simbol keagamaan, melainkan juga pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, ia mengajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun kawasan halal yang dapat menjadi percontohan di tingkat nasional maupun Asia.

"Kita berharap, Kalimantan Kelantan memiliki simbol halal yang kuat dan bisa menjadi salah satu kawasan industri halal terbaik di Asia. Karena sekarang, banyak pihak yang mulai menyadari bahwa yang kalah dengan halal itu bukan hanya soal label, tapi soal nilai tambah dan kepercayaan masyarakat," tambahnya.

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ini juga menjadi bagian dari upaya DPR dalam memastikan implementasi program ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas lembaga keagamaan di daerah. Sudian Noor menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis halal, serta berharap dukungan berkelanjutan dari Kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkannya. **gys/rdn**



Pemutihan BPJS, Harapan Baru Bagi Keluarga Rentan

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyatakan dukungan atas rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini menjadi kendala dalam akses layanan peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sejalan dengan mandat negara untuk memastikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan.

"Kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko kesehatan dan beban finansial yang menumpuk," kata Arzeti dalam keterangan rilisnya yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (9/10).

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan pemerintah tengah mengkaji dan merancang kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai triliunan rupiah pada November mendatang. Penghapusan tunggakan ini dimaksudkan agar peserta BPJS tak lagi terbebani utang masa lalu.

Sehingga mereka bisa kembali memulai iuran baru tanpa halangan administratif. Pembebasan tunggakan bukan berarti menghapus kewajiban masyarakat secara permanen, melainkan memberikan kesempatan baru agar sistem tetap berkelanjutan melalui kesadaran iuran yang baru. Terkait hal ini, Arzeti menilai hal tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini



Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina.

Pembebasan tunggakan bukan berarti menghapus kewajiban masyarakat secara permanen, melainkan memberikan kesempatan baru agar sistem tetap berkelanjutan melalui kesadaran iuran yang baru

kesulitan menerima akses kesehatan lantaran menunggak iuran BPJS.

"Kita sering temukan, banyak masyarakat menahan berobat karena BPJS Kesehatan-nya dibekukan karena belum bayar atau

menunggak, khususnya masyarakat dari kelompok rentan. Ini kan miris sekali ya, padahal bisa saja mereka menunggak karena berbagai persoalan dan beban hidup. Maka kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS menjadi harapan baru bagi masyarakat dari keluarga rentan untuk memperoleh akses kesehatan yang layak dari Negara," imbuh Politisi Fraksi PKB ini.

Namun di sisi lain, Anggota Komisi Kesehatan DPR itu berharap agar kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS tidak berdampak pada kelangsungan sistem JKN secara keseluruhan. Oleh karenanya, Arzeti menilai penting agar pembebasan tunggakan dilakukan dengan mekanisme yang terukur dan tepat sasaran.

 gal/rdn



Perundungan Sekolah Jadi Peringatan Serius Dunia Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan prihatin atas peristiwa perundungan (*bullying*) kepada seorang siswa SMPN 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa tengah yang kembali memakan korban jiwa. Tan menilai kasus tersebut menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan terhadap lemahnya pengawasan dan pencegahan kekerasan di sekolah.

“Kasus ini sebagai peringatan serius bagi dunia pendidikan atas lemahnya pengawasan dan pencegahan kekerasan di sekolah.

Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berinteraksi tanpa adanya rasa takut,” ujar Sofyan Tan dalam pesan singkatnya kepada **Parlementaria**, Kamis (16/10).

Oleh karena itu, Tan berharap pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dasar dan menengah), serta sekolah wajib memperkuat sistem pengawasan, bimbingan konseling, serta penerapan satuan tugas anti-bullying di setiap sekolah. Tidak hanya itu, Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menegaskan

pentingnya pendidikan karakter dan empati sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mencegah kekerasan antar siswa.

Serta adanya penegakan hukum yang transparan dan adil di setiap kasus perundungan, tanpa ada upaya menutupi fakta yang sebenarnya. “Selain untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku perundungan itu sendiri, penegakan hukum ini menjadi contoh agar siswa atau pihak lain tidak melakukan hal serupa,” tegas Politisi yang membidangi masalah pendidikan ini.

Beberapa hari belakangan, media diramaikan berita tentang wafatnya Siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Angga Bagus Perwira (12) pada Sabtu (11/10) di kelas, yang diduga akibat di-bully (perundungan) teman sekelasnya. Permasalahan tersebut sudah berhasil dimediasi internal pihak sekolah. Namun, hal itu kembali terjadi dengan pelaku yang berbeda, hingga korban meninggal dunia.

ayu/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan.

FOTO: MRI/PDT

Langkah Positif Bangun Kepercayaan Publik

Anggota Komisi XI DPR RI Tommy Kurniawan mengapresiasi langkah tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto yang memecat 26 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak karena diduga terlibat praktik penerimaan uang panas.

Menurut Tomkur, sapaan akrabnya, keputusan tersebut menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membersihkan institusi keuangan negara dari perilaku koruptif. "Ini langkah berani dan perlu diapresiasi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Uang pajak harus benar-benar dari rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya oknum penjahat," tegasnya dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria** di Jakarta, Jumat (10/10).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, tindakan tegas seperti ini akan memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara. Ia juga memberikan saran konstruktif agar pengelolaan pajak di Indonesia

dilakukan dengan lebih transparan dan efisien, mengingat jumlah penerimaan pajak nasional setiap tahun sangat besar.

"Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dana pajak bisa menjadi motor utama kemajuan bangsa. Kita punya potensi luar biasa untuk membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dosa 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru saja dipecat. Menurutinya, pemecatan itu berdasarkan temuan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Ia mendukung aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh anak buahnya itu.

we/rdn

Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan.



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: GER/PDT



Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.

Campuran BBM Jangan Jadi Alasan Impor Etanol

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari merespons rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang akan menerapkan E10 atau pencampuran 10 persen etanol dengan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, langkah tersebut, tidak bisa jadi alasan pemerintah untuk mengimpor etanol besar-besaran.

Ratna menegaskan, dirinya tidak menolak rencana tersebut karena sejalan dengan semangat transisi energi dan pengurangan emisi. "Saya mendukung E10 sebagai langkah menuju energi bersih.

Tapi jangan sampai kebijakan ini justru membuka keran impor baru. Pemerintah harus menjamin pasokan etanol dari dalam negeri cukup, baik dari sisi produksi maupun distribusi," tegas Ratna dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (9/10).

Politisi Fraksi PKB ini juga mendorong percepatan pembangunan pabrik bioetanol berskala besar di Bojonegoro, Jawa Timur. Menurutnya, kapasitas produksi pabrik yang sudah ada saat ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan etanol

sebagai campuran BBM fosil.

"Pabrik di Bojonegoro harus jadi prioritas nasional. Jangan hanya groundbreaking, tapi harus segera beroperasi agar bisa menutup defisit pasokan etanol. Tanpa itu, target E10 akan sulit tercapai tanpa impor," tambahnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang produksi etanol nasional pada 2024 mencapai sekitar 303 ribu kiloliter (kL) per tahun, dengan realisasi produksi baru sekitar 161 ribu kL. Padahal, jika program E10 diberlakukan secara penuh, kebutuhan etanol nasional diperkirakan mencapai 890 ribu kL per tahun atau sekitar 890 juta liter.

Ratna menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah sebelum menerapkan E10 secara nasional. Ia menegaskan, kemandirian energi hanya bisa terwujud jika seluruh rantai produksi etanol mulai dari bahan baku hingga distribusi sepenuhnya dikuasai oleh industri dalam negeri. **rdn**



Dukung Komnas Perempuan Jadi Satker Mandiri

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendorong agar Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) segera menjadi satuan kerja (satker) mandiri dan tidak lagi berada di bawah Komnas HAM. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan sejalan dengan mandat yang telah tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Komisi XIII DPR RI akan mendorong Komnas Perempuan menjadi satker mandiri, tidak lagi di bawah Komnas HAM. Ini untuk penguatan kelembagaan karena sudah tertuang atau menjadi amanat dalam UU TPKS,” ujar Willy kepada **Parlementaria**, Jakarta, Kamis (16/10).

Willy menjelaskan, dorongan ini juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kiprah panjang Komnas Perempuan yang tahun ini genap berusia 27 tahun. Ia menyampaikan hal tersebut usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Komnas Perempuan ke-27 yang digelar pada Rabu (15/10) bertema “Merawat Memori Kolektif, Meneguhkan Komitmen Kemanusiaan.”

Menurutnya, Komnas Perempuan memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai lembaga negara, tetapi juga sebagai simbol kesadaran bangsa terhadap pentingnya kemanusiaan dan keadilan gender. “Komnas Perempuan bukan sekadar lembaga negara. Ia adalah ruh peradaban yang tumbuh dari kesadaran bangsa akan luka-lukanya sendiri, luka kekerasan, luka diskriminasi, dan luka yang sering kali disembunyikan di bawah karpet moralitas sosial,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Willy menekankan pentingnya merawat ingatan kolektif bangsa sebagai upaya mencegah berulangnya kekerasan di masa depan. Ia mencontohkan bagaimana negara-negara lain memilih berdamai dengan masa lalunya melalui pengakuan dan pembelajaran sejarah. “UU TPKS adalah capaian historis yang lahir dari kerja panjang solidaritas sosial, bukan hasil kompromi politik. Komnas

Perempuan berada di jantung perjuangan itu,” pungkas Willy.

— ssb/aha

Ketua Komisi XIII DPR RI,
Willy Aditya.



FOTO: RSB/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Ajak Masyarakat Pahami Diplomasi Parlemen

Selain fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI juga diamanahkan untuk menjalankan fungsi diplomasi. Meskipun tak sefamiliar tiga fungsi lainnya, DPR RI berdiplomasi dengan sesama anggota parlemen negara lain dalam rangka memuluskan kepentingan nasional di kancah internasional.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerangkan, diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI tak bisa dipandang sebelah mata. DPR RI kerap memberi masukan di berbagai forum parlemen terkait isu-isu penting seperti isu perdamaian di Palestina, Konflik Rusia-Ukraina hingga tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

"Masyarakat harus *aware* akan hal seperti ini," tegas Mardani kepada **Parlementaria**, Selasa (14/10).

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait fungsi diplomasi, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (BKSAP

dan OI) Sekretariat Jenderal DPR RI meluncurkan platform Edukasi dan Diplomasi Parlemen (SiSi parlemen). Mardani menambahkan, Platform SiSi Parlemen nantinya akan mengedukasi masyarakat terkait *second track diplomacy*.

"Dengan sisi Parlemen, masyarakat akan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kepentingan negara yang sedang diperjuangkan di berbagai forum baik itu regional maupun internasional. Jadi, kita ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan," ungkap politisi Fraksi PKS ini.

Diketahui, baru-baru ini Biro KSAP dan OI Setjen DPR RI meluncurkan platform SiSi Parlemen. Platform yang menyasar para pelajar hingga mahasiswa ini memberikan edukasi terkait peran diplomasi yang dijalankan DPR RI. Dengan harapan, generasi Indonesia kedepan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh terkait sepak terjang DPR RI di kancah internasional. **aha**

Ketua Badan Kerja Sama
Antar Parlemen (BKSAP)
DPR RI Mardani Ali Sera.



FOTO: JKA/PDT

Aksi Haru Warga Terdampak Penutupan Usaha

Suasana reses Anggota DPR RI Mulyadi di Kabupaten Bogor pada Rabu lalu (9/10/2025) mendadak haru.

Puluhan konstituen tiba-tiba menggelar aksi 'tebar poster' sebagai bentuk protes atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang menutup sejumlah

tempat usaha di kawasan Puncak.

Dalam aksi tersebut, warga membawa poster besar bertulisan "Pak Presiden, jangan tutup mata pencaharian kami" dan "Pak Mulyadi, bantu kami untuk mempertahankan pekerjaan kami". Tulisan itu menjadi simbol jeritan

Banyak yang dirumahkan sekarang. Makanya saya dan teman teman kesini. Minta dukungan kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur. Mohon bantuannya Pak. Jangan sampai kami kelaparan karena susah cari pekerjaan

hati para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan penyegelan tempat usaha yang disebut berdampak luas pada ekonomi masyarakat kecil.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh **Parlementaria**, salah seorang warga menyampaikan curahan hatinya dengan suara bergetar di hadapan Mulyadi dan peserta lainnya. "Banyak yang dirumahkan pak, banyak yang dirumahkan sekarang. Makanya saya dan teman teman kesini. Minta dukungan kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur. Mohon bantuannya Pak. Jangan sampai kami kelaparan karena susah cari pekerjaan," ujarnya.

Merespon hal itu, Mulyadi menyatakan akan menampung dan menyampaikan langsung keluhan konstituennya kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan, setiap kebijakan seharusnya tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah. "Saya memahami betul keresahan warga. Kebijakan apapun seharusnya tidak mematikan mata pencaharian rakyat. Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada bapak Presiden," tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu pun mengkritik keras kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel hingga menutup puluhan usaha wisata di kawasan Puncak, Bogor. Menurutnya, langkah tersebut terlalu terburu-buru dan tanpa kajian yang matang, sehingga berdampak pada ekonomi warga sekitar.

"Presiden Prabowo harus mengevaluasi kebijakan Menteri LH yang sembron dan tanpa kajian menyegel dan menutup puluhan usaha di Puncak," ujarnya. **rnm/aha**

Anggota DPR RI
Mulyadi.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: DOK/AHA

Dukung Penguatan Layanan Kesehatan Mental Daerah

Anggota DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas, melakukan kunjungan kerja ke RSUD dr. Harjono Ponorogo dalam rangka audiensi bertajuk “Mental Kuat, Jiwa Sehat, Rakyat Bahagia, Indonesia Maju.” Dalam sambutannya, Ibas menegaskan pentingnya penguatan sistem kesehatan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan — mulai dari pemerataan fasilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga dukungan fiskal yang memadai.

“Saya mengawal dan mendorong agar pusat-pusat kesehatan terus tumbuh, berkembang, dan masyarakatnya semakin sehat,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut dalam keterangannya yang diperoleh **Parlementaria**, Kamis (16/10).

Pria yang biasa disapa Ibas ini menyampaikan bahwa kesehatan adalah kunci kebahagiaan dan kemajuan bangsa, mengaitkan pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan kualitas hidup masyarakat. “Hidup masyarakat akan semakin bahagia jika lingkungannya aman, bersih, tertib, dan sehat. Dengan mental yang kuat dan jiwa yang sehat, Indonesia akan lebih maju, dan rakyatnya lebih bahagia serta sejahtera,” ucapnya.

Dalam audiensi tersebut, Ibas menegaskan bahwa kunjungannya bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen

konkret sebagai wakil rakyat. “Tema hari ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk membangun sistem kesehatan yang adil dan merata,” ungkapnya.

Edhie Baskoro juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap RSUD dr. Harjono sebagai rumah sakit tipe B yang menjadi andalan layanan kesehatan di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. “Saya bangga Ponorogo menjadi salah satu pemilik rumah sakit tipe B dari 450 yang ada di Indonesia.

Tentu kita berharap rumah sakit ini terus dikembangkan, terutama dalam layanan jantung, stroke, rawat inap, dan fasilitas unggulan lainnya.”

Sebagai Legislatur Dapil Jawa Timur VII, Ibas menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dukungan anggaran dan peningkatan tenaga kesehatan. “Kita harus memastikan alokasi fiskal yang cukup untuk sektor kesehatan. Dokter umum dan spesialis harus semakin banyak, dan seluruh fasilitas kesehatan, dari rumah sakit hingga Posyandu, harus terhubung dalam ekosistem layanan yang kuat,” jelasnya. — **bia/aha**

Anggota DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono.



FOTO: DOK/AHA



Serius Wujudkan Ketahanan Pangan Sumssel



FOTO: UM/AHA

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat membuka agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Sumatera Selatan menjadi panggung kolaborasi besar lintas komisi dan kementerian untuk memastikan target ambisius kemandirian pangan nasional tahun 2027 terwujud. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa isu pangan bukan lagi urusan satu lembaga, melainkan kerja kolektif seluruh elemen negara.

“Ketahanan pangan adalah agenda utama bangsa, bahkan menjadi prioritas pertama Presiden bersama ketahanan energi,” ujar Saan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10).

Ketahanan pangan adalah agenda utama bangsa, bahkan menjadi prioritas pertama Presiden bersama ketahanan energi

Dirinya pun menyampaikan agenda kunjungan kerja istimewa ini melibatkan dua komisi yang ada di DPR, Komisi IV dan Komisi V, demu membahas pangan dan infrastruktur pendukungnya. Baginya, upaya ini adalah bentuk kesadaran baru di parlemen bahwa sektor pangan menuntut pendekatan terintegrasi.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. DPR, kementerian,

pemerintah daerah, dan BUMN harus berjalan seirama. Kalau perlu, terintegrasi dengan ATR/BPN agar tata ruang dan perlindungan lahan pertanian tidak saling bertabrakan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Perlu diketahui, Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai lokasi kunjungan sebab perannya selaras dengan lima besar produsen pangan nasional, yang sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang yang diperoleh, luas lahan produktif di provinsi ini meningkat dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare. Produktivitas padi pun naik dari rata-rata 5,6 ton per hektare menjadi 6 ton per hektare.

um/rdn





Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama tim menyoroti perlunya penelarasan antara Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan ketentuan khusus di wilayah otonomi khusus Papua. Hal ini jadi perhatiannya saat agenda Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Wamena, Papua Pegunungan, Senin (6/10). Foto: Aar/Um





DARI RUANG SIDANG

TAYANG SETIAP HARI

SAKSIKAN HANYA DI:

<https://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID>



TVR PARLEMEN

TVR
PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri